ANALISIS KESIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI INDONESIA PADA TAHUN 2021

¹ Muhammad Marshal Nugroho, ¹ Amarrakhaisya Syamsuar, ¹ Ameerakhaiya Syamsuar, ¹ Hafizh Muhammad Anfasha Yunaryo, ¹ Lintang Ambar Pramesti, ¹ Ma'ruf Nurrudin, ¹ Muhammad Alif Darmamulia, ¹ Rachiny Anantridha Fasya, ¹ Salsabilla Husna Haniffah, ¹ Sanjika Ilham Putra Lumban Gaol, ² Ernawati

¹Institut Teknologi Bandung

²Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan Sositologi Institut Teknologi Bandung

m.marshalnugroho@gmail.com

Bandung, 40132, Indonesia

Abstract

The COVID-19 pandemic affects almost every aspect. The level of spread and the high number of positive cases force humans to adapt to prevent the spread of the COVID-19 virus. The education aspect is one of the aspects affected by COVID-19. As a result, the learning process is carried out online to prevent the spread of COVID-19. In practice, there are still some deficiencies in the online learning process in Indonesia. These deficiencies are supporting factors such as uneven internet connections or socio-economic class differences that can cause differences in the level of acceptance of knowledge between students. Thus, it has been considered by the government to carry out an offline learning process. The plan for implementing face-to-face learning activities will start in January 2021. Of course, some preparations must be made by the government and the community before implementing offline learning. Based on the research that has been done, it is concluded that the government and the community must prepare human resources, prepare facilities and infrastructure, administer licensing, and carry out the COVID-19 vaccine immunization sequentially.

Keywords: COVID-19; education; learning process; online learning; offline learning

Abstrak

Pandemi COVID-19 berdampak pada hampir seluruh aspek. Tingkat penyebaran dan tingginya angka kasus positif memaksa manusia untuk beradaptasi demi mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Aspek pendidikan menjadi salah satu aspek yang terdampak COVID-19. Akibatnya, proses pembelajaran dilakukan secara daring (dalam jaringan) demi mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kekurangan pada proses pembelajaran secara daring di Indonesia. Kekurangan tersebut adalah faktor pendukung seperti koneksi internet yang tidak merata atau perbedaan kelas sosio-ekonomi yang dapat menyebabkan perbedaan tingkat penerimaan ilmu antar peserta didik. Sehingga, telah dipertimbangkan oleh pemerintah untuk melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka. Rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka akan dimulai pada Januari 2021. Tentunya, dibutuhkan beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat harus menyiapkan sumber daya manusia, menyiapkan sarana dan prasarana, mengurus perizinan, serta melaksanakan imunisasi vaksin COVID-19 secara berurutan.

Kata Kunci: Pendidikan; proses pembelajaran; pembelajaran daring; pembelajaran tatap muka

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) menuntut dunia untuk beradaptasi. Seluruh pihak dituntut untuk menghindari aktivitas yang berpotensi menjadi kluster baru penyebaran COVID-19. Pelaksanaan kegiatan secara daring merupakan salah satu solusi adaptif di tengah masa pandemi. Berbagai aspek telah menerapkan pelaksanaan kegiatan secara daring sebagai langkah preventif penyebaran COVID-19, salah satunya aspek pendidikan.

Kegiatan belajar mengajar di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 sejauh ini dilakukan secara daring. Dalam prosesnya, masih dibutuhkan beberapa adaptasi serta perbaikan. Hal tersebut didasari oleh kualitas faktor-faktor pendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Beberapa faktor pendukung tersebut antara lain, gawai, komputer, koneksi internet, serta televisi (Putria, Maula, & Uswatun, 2020). Sebagai salah satu faktor pendukung, kualitas koneksi internet Indonesia saat ini dapat dikatakan kurang dari cukup. Saat ini, kualitas koneksi internet Indonesia menempati peringkat 115 dari 176 negara dengan rata-rata kecepatan internet sebesar 23,04 Mbps (*Megabit per second*) (Ookla, 2020).

Dalam praktiknya, kegiatan belajar mengajar secara daring di Indonesia dapat dikatakan belum siap. Hal tersebut didasari oleh kualitas elemen pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia masih dapat dikatakan cukup rendah. Selain itu, proses pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia belum memiliki acuan tetap (dalam hal ini kurikulum pembelajaran daring). Selanjutnya, kualitas faktor pendukung proses pembelajaran secara daring Indonesia juga masih belum merata. Apabila penggunaan metode daring masih diteruskan sementara kualitas faktor pendukungnya masih rendah, maka kualitas luaran proses pendidikan (dalam hal ini kompetensi lulusan) akan terus menurun.

Berdasarkan analisis kondisi proses pembelajaran di Indonesia, pemerintah melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) nomor 03 tahun 2020 menimbang untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka pada awal tahun 2021 (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Akan tetapi, kondisi lapangan di Indonesia saat ini masih menunjukkan peningkatan kasus positif COVID-19 yang signifikan (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020). Oleh karena itu, pemerintah dengan masyarakat harus mempersiapkan diri dan lingkungan sekitarnya pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada Januari 2021. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi proses pembelajaran di Indonesia saat ini?
2. Apa saja aspek utama dalam proses pembelajaran?
3. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di Indonesia?

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Metode studi pustaka dilakukan dengan melakukan pencarian dan analisis data yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk dapat memahami proses pembelajaran yang terjadi di Indonesia selama masa pandemi serta untuk mengetahui persiapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada Januari 2021.

Metode analisis yang akan digunakan dalam penentuan urutan prioritas aktivitas persiapan pembelajaran tatap muka adalah metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*). Proses analisis hierarki adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang dilakukan dengan urutan hierarki untuk menentukan prioritas maupun solusi tunggal dari pilihan yang dihadapi (Vidal, Marle, & Bocquet, 2011). Dalam praktiknya, penyelesaian masalah dengan proses analisis hierarki dibantu dengan metode perbandingan *Pairwise*. Metode perbandingan *pairwise* membantu aplikasi proses analisis hierarki pada penghitungan nilai bobot yang menunjukkan perbandingan prioritas antar aspek-aspek yang akan dibandingkan (Förnkrantz & Hüllermeier, 2010). Proses analisis hierarki dan metode perbandingan *pairwise* digunakan oleh peneliti karena peneliti kurang berpengalaman dalam merumuskan skala prioritas sehingga dibutuhkan sebuah dasar acuan logis dalam perumusan skala prioritas untuk mendukung penentuan prioritas dari solusi permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan proses pembelajaran tatap muka di Indonesia pada Januari 2021 disesuaikan dengan kondisi, dasar hukum, serta kebutuhan proses pembelajaran yang diimplementasikan saat ini.

Kondisi Pendidikan di Indonesia

Proses pembelajaran merupakan bagian dari aspek pendidikan. Sebelum mengetahui kondisi pembelajaran di Indonesia, peneliti akan membahas kondisi pendidikan di Indonesia secara umum. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kondisi pendidikan di Indonesia termasuk dalam kondisi gawat darurat. Secara umum, perkembangan positif kondisi pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Positif Kondisi Pendidikan di Indonesia

No.	Aspek	Capaian
1.	Jumlah Institusi Pendidikan Dasar dan Menengah	Meningkat, pada tahun 2014 jumlahnya: 1. SD (Sekolah Dasar): 148.061 2. Sekolah Menengah: 36.210 3. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan): 25.580
2.	Jumlah Peserta Pendidikan Dasar dan Menengah	Meningkat, pada tahun 2014 jumlahnya: 1. SD: 26.119.000 2. Sekolah Menengah: 9.901.000 3. SMK: 1.735.000
3.	Persentase Partisipasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Angka partisipasi meningkat, pada tahun 1975 sebesar 75%. Pada tahun 2007 sebesar 95%
4.	Persentase Angka Buta Huruf	Angka buta huruf menurun, pada tahun 1945 sebesar 95%. Pada tahun 2011 sebesar 8%
5.	Jumlah Mahasiswa	Jumlahnya meningkat, pada tahun 1970 sebanyak sekitar 250.000. Pada tahun 2007, jumlahnya sekitar 3.750.000.

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tahun 2014
 Berdasarkan tabel 1, kondisi pendidikan di Indonesia telah berkembang positif. Perkembangan tersebut didukung oleh 5 aspek, yakni jumlah institusi pendidikan dasar dan menengah, jumlah peserta pendidikan dasar dan menengah, persentase partisipasi pendidikan dasar dan menengah, persentase angka buta huruf, dan jumlah mahasiswa. Kelima aspek tersebut akan dibahas lebih detail satu per satu.

Pertama, jumlah institusi pendidikan dasar dan menengah. Institusi pendidikan dasar dan menengah dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan tingkatnya. Pada tingkat SD, jumlah institusinya sebanyak 148.061. Pada tingkat sekolah menengah, jumlah institusinya sebanyak 36.021. Pada tingkat SMK, jumlah institusinya sebanyak 25.580.

Kedua, jumlah peserta pendidikan dasar dan menengah. Seperti pada aspek jumlah insititusi pendidikan dasar dan menengah, aspek jumlah peserta pendidikan dasar dan menengah juga dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan tingkatnya. Pada tingkat SD, jumlah peserta didiknya adalah 26.119.000. Pada tingkat sekolah menengah, jumlah peserta didiknya sejumlah 9.901.000. Sedangkan pada tingkat SMK, jumlah peserta didiknya sebanyak 1.735.000.

Ketiga, persentase partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Dari tahun 1975 hingga 2007, telah terjadi peningkatan partisipasi pendidikan dasar dan menengah sebesar 20%. Rinciannya, persentase partisipasi peserta pendidikan dasar dan menengah terhadap penduduk pada tahun 1975 adalah sebesar 75%. Sedangkan pada tahun 2007, persentase pendidikan dasar dan menengah terhadap penduduk adalah sebesar 95%.

Keempat, persentase angka buta huruf. Telah terjadi penurunan drastis pada angka buta

huruf di Indonesia. Nilai penurunan angka buta huruf di Indonesia adalah sebesar 87% pada rentang tahun 1945 hingga 2011. Rinciannya, persentase angka buta huruf terhadap jumlah penduduk adalah 95% pada tahun 1945. Sedangkan pada tahun 2011, persentase angka buta huruf terhadap jumlah penduduk di Indonesia adalah sebesar 8%.

Kelima, jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa di Indonesia meningkat secara drastis. Secara rinci, jumlah mahasiswa pada tahun 1970 adalah sekitar 250.000. Sedangkan pada tahun 2007, jumlah mahasiswa adalah sekitar 3.750.000.

Di balik fakta perkembangan positif kondisi pendidikan di Indonesia secara umum, masih terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki. Pada tabel 2, akan dijelaskan perkembangan negatif kondisi pendidikan di Indonesia.

Tabel 2. Perkembangan Negatif Kondisi Pendidikan di Indonesia

No.	Aspek	Capaian
1.	Kualitas Sekolah di Indonesia	Sebanyak 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar minimal layanan pendidikan.
2.	Kompetensi Guru	Nilai rata-rata uji kompetensi guru adalah sebesar 44,5 dari nilai yang diharapkan sebesar 70.
3.	Akses dan Mutu Pendidikan secara Umum	Berdasarkan pemetaan <i>The Learning Curve-Pearson</i> , Indonesia berada pada posisi 40 dari 40 negara.
4.	Mutu Pendidikan Tinggi	Dari pemetaan oleh Universitas ²¹ pada tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat 49 dari 50 negara.
5.	Literasi Sains	Menurut hasil pemetaan TIMSS (<i>Trends in International Mathematics and Science Studies</i>) pada tahun 2011, Indonesia berada pada peringkat 40 dari 42 negara.
6.	Pemetaan PISA (<i>Program for International Student Assessment</i>)	Berdasarkan hasil pemetaan PISA pada tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 negara.

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tahun 2014

Dari tabel 2, dapat diketahui bahwa pendidikan Indonesia masih rendah secara kualitas. Terdapat 6 aspek yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Enam aspek tersebut adalah kualitas sekolah di Indonesia, kompetensi guru, kemudahan akses dan mutu pendidikan secara umum, mutu pendidikan tinggi, tingkat literasi sains, serta hasil pemetaan PISA. Pada paragraf berikutnya akan dijelaskan lebih rinci mengenai perkembangan negatif kondisi pendidikan di Indonesia.

Pada aspek kualitas sekolah di Indonesia, sebanyak 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar minimal. Pada kompetensi guru, nilai rata-rata hasil uji kompetensi guru adalah 44,5 dari 70 sebagai nilai yang diharapkan. Selanjutnya, akses dan mutu pendidikan di Indonesia secara umum berada pada peringkat 40 dari 40 negara. Untuk mutu pendidikan tinggi, Indonesia berada pada peringkat 49 dari 50 negara berdasarkan pemetaan Universitas. Hasil penelitian TIMSS pada tahun 2011 menunjukkan bahwa

Indonesia berada pada peringkat 40 dari 42 negara pada aspek literasi sains. Terakhir, Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 negara pada hasil pemetaan PISA di tahun 2012.

Setelah mengetahui kondisi pendidikan di Indonesia secara umum, selanjutnya akan dibahas kualitas pendidikan Indonesia berdasarkan standar pendidikan nasional. Dasar penilaian kualitas pendidikan di Indonesia adalah delapan poin pada Standar Nasional Pendidikan (Presiden Republik Indonesia, 2005). Lingkup Standar Nasional Pendidikan Indonesia meliputi:

1. Standar isi
2. Standar proses
3. Standar kompetensi lulusan
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar pengelolaan
7. Standar pembiayaan
8. Standar penilaian pendidikan.

Berdasarkan delapan poin tersebut, kualitas pendidikan nasional berdasarkan tingkat pencapaian standar nasional pendidikan pada tingkat SMP di Indonesia dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pencapaian Standar Pendidikan Nasional pada Tingkat SMP

No.	Standar	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Isi	89,40
2.	Proses	90,99
3.	Kompetensi Lulusan	65,10
4.	Ketenagaan	80,27
5.	Sarana dan Prasarana	86,03
6.	Pengelolaan	94,63
7.	Pembiayaan	88,36
8.	Penilaian	92,99
Rata-rata		85,97

Sumber: Sabar Budi Raharjo, Tahun 2012

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pencapaian standar pendidikan nasional adalah sebesar 85,97% pada tingkat SMP. Pada tingkat SMP, standar nasional yang paling mudah untuk dipenuhi adalah pada aspek pengelolaan (94,63%). Sedangkan yang paling sulit untuk dipenuhi adalah pada aspek kompetensi lulusan (65,10%). Selain pada tingkat SMP, pada tabel 4 akan ditunjukkan nilai pemenuhan standar nasional pendidikan pada tingkat SD, SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), dan SMK.

Tabel 4. Pencapaian Standar Pendidikan Nasional pada Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pencapaian (%)
1.	SD	73,55
2.	SMP	85,97
3.	SMA	77,07
4.	SMK	76,15
Rata-rata		78,19

Sumber: Sabar Budi Raharjo, Tahun 2012

Pada tabel 4, dapat diketahui tingkat pemenuhan standar pendidikan nasional pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dari data tersebut, diketahui bahwa tingkat pencapaian standar nasional pendidikan berada pada tingkat SMP. Sedangkan untuk tingkat pemenuhan paling rendah berada pada tingkat SD. Pada tingkat pendidikan tinggi, universitas dan institusi di Indonesia masih terus memperbaiki dan mengembangkan kegiatan yang berkaitan dengan tridarma perguruan tinggi di Indonesia. Isi dari tridarma perguruan tinggi tersebut adalah penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat (Nulhaqim, Heryadi, Pancasilawan, & Fedryansyah, 2016).

Proses Pembelajaran di Indonesia

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Presiden Republik Indonesia, 2003). Pada bagian sebelumnya, telah dibahas bahwa proses pembelajaran termasuk dalam standar nasional pendidikan. Pada tabel 3, dapat diketahui bahwa pemenuhan standar proses pembelajaran adalah sebesar 90,99% pada tingkat SMP di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan proses pembelajaran di Indonesia sudah cukup baik.

Dalam standar pendidikan nasional, proses pembelajaran merupakan salah satu poin yang harus dipenuhi. Kemudian, terdapat korelasi antara standar pendidikan nasional yang satu dengan lainnya. Sehingga, dapat diurutkan berdasarkan koefisien korelasi jika dibandingkan dengan antara standar satu dengan lainnya. Pada tabel 5, akan ditunjukkan hubungan antara standar berdasarkan koefisien korelasi dengan proses pembelajaran.

Tabel 5. Hubungan Antara Standar Pendidikan Nasional dengan Proses Pembelajaran

No.	Korelasi Antar Standar	Koefisien Korelasi
1.	Isi dengan proses	0,378
2.	Ketenagaan dengan proses	0,228
3.	Sarana dan prasarana dengan proses	0,274
4.	Pembiayaan dengan proses	0,126
5.	Pengelolaan dengan proses	0,121
6.	Penilaian dengan proses	0,301

Sumber: Sabar Budi Raharjo, Tahun 2012

Dari tabel 5 tersebut, hanya terdapat hubungan proses pembelajaran dengan 6 aspek standar pendidikan nasional. Hal tersebut karena kompetensi lulusan tidak mempengaruhi jalannya proses pembelajaran. Selanjutnya, dapat diketahui bahwa proses pembelajaran

memiliki nilai koefisien korelasi paling tinggi dengan standar isi pendidikan. Sedangkan aspek pengelolaan memiliki nilai korelasi koefisien yang paling rendah dengan proses pembelajaran.

Kualitas proses pembelajaran yang dilakukan dapat tergambarkan melalui kualitas kompetensi lulusan yang dihasilkan. Berikut ini korelasi antara standar nasional pendidikan dengan kompetensi lulusan.

Tabel 6. Hubungan Antara Standar Pendidikan Nasional dengan Kompetensi Lulusan

No.	Korelasi Antar Standar	Koefisien Korelasi
1.	Isi dengan lulusan	0,289
2.	Ketenagaan dengan lulusan	0,337
3.	Sarana dan prasarana dengan lulusan	0,405
4.	Pembiayaan dengan lulusan	0,162
5.	Pengelolaan dengan lulusan	0,007
6.	Penilaian dengan lulusan	0,483
7.	Proses dengan lulusan	0,429

Sumber: Sabar Budi Raharjo, Tahun 2012

Dari tabel 6, dapat diketahui hubungan antara standar pendidikan dengan kompetensi lulusan melalui nilai koefisien korelasi. Diketahui bahwa standar penilaian memiliki nilai korelasi tertinggi dengan kompetensi lulusan sebesar 0,483. Selanjutnya, standar pengelolaan memiliki korelasi terendah dengan kompetensi lulusan dengan koefisien korelasi sebesar 0,007. Sedangkan untuk proses pembelajaran berada pada urutan kedua dengan kompetensi lulusan, yakni sebesar 0,429.

Di tengah masa pandemi, proses pembelajaran di Indonesia dianjurkan secara daring. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kondisi pembelajaran secara kondusif di tengah masa pandemi. Selain itu, pembelajaran secara daring juga dianjurkan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran COVID-19 pada lingkungan pendidikan. Untuk menyukseskan pelaksanaan pembelajaran secara daring, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran dengan nomor 36962/MPK.A/HK/2020 pada tanggal 13 Maret 2020. Berikut ini isi dari surat edaran tersebut, antara lain:

1. Penegakan protokol kesehatan oleh seluruh pihak
2. Pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 tertanggal 9 Maret 2020.
3. Mengganti pelaksanaan kegiatan massal secara virtual
4. Melaksanakan kegiatan belajar dan bekerja dari rumah. Apabila terpaksa harus ke kantor/kampus/sekolah, disarankan untuk tidak menggunakan kendaraan umum yang bersifat massal
5. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan apabila terdapat pegawai/mahasiswa/siswa yang mengalami gejala COVID-19

6. Pelaksanaan belajar dan bekerja dari rumah disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Dalam lampiran surat tersebut, juga disediakan daftar lembaga penyedia jasa pendidikan yang telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penyedia layanan pendidikan tersebut antara lain, Rumah Belajar, Google G Suites for Education, Kelas Pintar, Microsoft Office 365, Quipper School, Sekolah Online Ruang Guru, Sekolahmu, dan Zenius.

Aspek Utama Proses Pembelajaran di Indonesia

Berdasarkan definisi proses pembelajaran yang terdapat pada undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, terdapat beberapa aspek utama dalam proses pembelajaran (Presiden Republik Indonesia, 2003). Berikut ini adalah aspek utama dalam proses pembelajaran di Indonesia:

1. Peserta didik
2. Tenaga pengajar
3. Interaksi
4. Sumber belajar
5. Lingkungan belajar

Dari aspek utama proses pembelajaran tersebut, masih terdapat beberapa aspek pendukung dalam proses pembelajaran. Aspek pendukung tersebut harus ada, terutama dalam pelaksanaan program belajar dari rumah. Contoh dari aspek pendukung proses pembelajaran di Indonesia adalah koneksi internet dan gawai. Koneksi internet dan gawai sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada masa belajar dari rumah karena kedua aspek pendukung tersebut membantu berlangsungnya proses kegiatan belajar dari rumah.

Persiapan Pembelajaran Tatap Muka di Indonesia

Melalui SKB no. 03 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19, empat menteri telah menyepakati untuk memperbolehkan kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Pada pelaksanaannya nanti, kegiatan pembelajaran tatap muka akan dimulai secara bertahap.

Berdasarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020), terdapat beberapa urgensi pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Urgensi tersebut antara lain:

1. Ancaman putus sekolah

Terdapat dua persepsi yang melatarbelakangi alasan ini. Pertama, beberapa anak

'terpaksa' bekerja untuk membantu keuangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Kedua, banyak orang tua yang tidak melihat peranan satuan pendidikan dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran dilaksanakan tidak secara tatap muka.

2. Kendala tumbuh kembang

Pada urgensi ini, terdapat 3 poin yang menjadi latar belakang. Pertama, kesenjangan capaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas faktor pendukung mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama pada anak dengan sosio-ekonomi berbeda. Kedua, ketidakefektifan pertumbuhan. Pada tingkat PAUD, peserta didik dapat kehilangan potensi tumbuh kembang yang optimal di masa emas pertumbuhan. Ketiga, risiko terjadinya "*learning loss*". Hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan dapat berisiko pada proses pembelajaran kognitif dan perkembangan karakter pada jangka panjang.

3. Tekanan psikososial

Tekanan psikososial memungkinkan timbulnya stres pada peserta didik sebagai akibat dari minimnya interaksi dengan lingkungan pendidikan serta tekanan akibat sulitnya penerapan pembelajaran jarak jauh.

Berdasarkan 3 urgensi tersebut, pembelajaran tatap muka harus dapat segera dimulai. Dalam kebijakan pembelajaran tatap muka, perizinan harus diberikan terlebih dahulu. Tahapan perizinan dimulai dari Pemda (Pemerintah Daerah) atau Kanwil (Kantor Wilayah)/ Kantor Kemenag (Kementerian Agama). Kemudian, dilakukan pemeriksaan dengan daftar periksa yang nantinya akan didukung dengan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali. Apabila orang tua setuju melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka proses pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap. Dalam pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka oleh Pemda, terdapat beberapa faktor penentu sebagai pertimbangan. Faktor tersebut antara lain:

1. Tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut
2. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan
3. Kesiapan satuan pendidikan
4. Akses pendukung Belajar dari Rumah
5. Kebutuhan layanan pendidikan
6. Ketersediaan akses transportasi yang aman
7. Lingkungan tempat tinggal warga satuan pendidikan
8. Mobilitas warga
9. Kondisi geografis daerah

Bagi satuan pendidikan, berikut ini adalah daftar periksa yang harus dipenuhi sebelum dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
2. Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan
3. Penerapan kewajiban penggunaan masker
4. Penyediaan *thermo gun*
5. Pemetaan kondisi warga satuan pendidikan
6. Persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali

Selanjutnya apabila pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan, protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Pada tabel 7, akan ditampilkan protokol kesehatan untuk pelaksanaan tatap muka.

Tabel 7. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka

No.	Aspek	Masa Transisi (2 bulan pertama)	Masa Kebiasaan Baru
1.	Kondisi kelas	<ul style="list-style-type: none"> • Jaga jarak minimal 1,5 meter • Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas: • PAUD: 5 (dari standar 15 peserta didik) <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dasar dan menengah: 18 (dari standar 36 peserta didik) • SLB: 5 (dari standar 8 peserta didik) 	
2.	Jadwal Pembelajaran	Sistem rombongan belajar yang bergiliran (<i>shifting</i>)	
3.	Perilaku Wajib	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan masker sesuai standar • Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>hand sanitizer</i> • Jaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik • Menerapkan etika batuk/bersin 	
4.	Kondisi medis warga satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sehat dan jika mengidap komorbid, harus terkontrol • Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk pada orang dengan warga sekolah 	
5.	Kantin	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan protokol kesehatan
6.	Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan, kecuali menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak
7.	Kegiatan selain pembelajaran	Tidak diperbolehkan selain Kegiatan Belajar Mengajar	Diperbolehkan dengan protokol kesehatan
8.	Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan		Diperbolehkan dengan protokol kesehatan

Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Tahun 2020

Setelah mengetahui kondisi dan anjuran pemerintah mengenai pembelajaran tatap muka, berikutnya akan dilakukan analisis prioritas dengan menggunakan proses analisis hierarki dan metode *pairwise*. Tahap pertama pada penentuan prioritas adalah menentukan nilai bobot dari tiap aspek pertimbangan yang nantinya menjadi penentu prioritas persiapan

pembelajaran tatap muka di Indonesia pada Januari 2021 dengan metode *pairwise*. Pada penentuan prioritas persiapan yang peneliti lakukan, terdapat 5 aspek yang menjadi pertimbangan. Aspek-aspek tersebut adalah murahnya biaya implementasi, urgensi pelaksanaan, kemudahan implementasi, kemudahan pengawasan, dan kemudahan evaluasi. Dalam penilaian dengan metode *pairwise*, peneliti menggunakan 3 jenjang parameter. Angka 1 berarti sama pentingnya, angka 2 berarti lebih penting, dan angka 3 berarti jauh lebih penting. Pada tabel 8, akan ditampilkan hasil penghitungan bobot penilaian skala prioritas dengan metode *pairwise*.

Tabel 8. Bobot Aspek Skala Prioritas

Aspek	Murahnya Biaya Implementasi	Urgensi Penerapan	Kemudahan Implementasi	Kemudahan Pengawasan	Kemudahan Evaluasi	Jumlah Nilai	Bobot
Murahnya Biaya Implementasi	1	0,33	0,5	0,5	0,5	2,83	0,085
Urgensi Penerapan	3	1	3	3	3	13,00	0,390
Kemudahan Implementasi	2	0,33	1	2	2	7,33	0,220
Kemudahan Pengawasan	2	0,33	0,5	1	2	5,83	0,175
Kemudahan Evaluasi	2	0,33	0,5	0,5	1	4,33	0,130

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2020

Dari tabel 8, diperoleh nilai bobot dari setiap aspek yang dipertimbangkan dalam pengurutan prioritas persiapan pembelajaran tatap muka. Aspek murahnya biaya implementasi bernilai 0,085; Aspek urgensi penerapan bernilai 0,390; Aspek kemudahan implementasi bernilai 0,22; Aspek kemudahan pengawasan bernilai 0,175. Terakhir, untuk aspek kemudahan evaluasi bernilai 0,13.

Setelah mengetahui nilai bobot dari tiap aspek yang menjadi parameter, selanjutnya akan ditentukan skala prioritas dari persiapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka. Setelah menganalisis kondisi dan dasar hukum proses pembelajaran yang berlaku, didapatkan 4 kegiatan yang dapat dijadikan persiapan pada proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Indonesia pada masa pandemi. Kegiatan tersebut adalah mengurus perizinan, mempersiapkan sarana dan prasarana, mempersiapkan sumber daya manusia, dan imunisasi vaksin COVID-19. Pada tabel 9, ditampilkan hasil penentuan skala prioritas persiapan pembelajaran tatap muka dengan metode proses analisis hierarki. Peneliti menggunakan skor 1 sampai 4. Skor 4 menandakan solusi dengan skor tersebut memiliki nilai parameter terbaik dibanding solusi lain dan skor 1 menandakan solusi dengan skor tersebut memiliki nilai parameter terburuk dibanding solusi lain.

Tabel 9. Skala Prioritas Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Parameter	Bobot	Mengurus Perizinan		Mempersiapkan Sarana dan Prasarana		Mempersiapkan Sumber Daya Manusia		Imunisasi Vaksin COVID-19	
		Skor	Skor dengan Bobot	Skor	Skor dengan Bobot	Skor	Skor dengan Bobot	Skor	Skor dengan Bobot
Mudahnya Biaya Implementasi	0,085	3	0,255	2	0,17	4	0,34	1	0,085
Urgensi Penerapan	0,390	2	0,78	3	1,17	1	0,39	4	1,56
Kemudahan Implementasi	0,220	3	0,66	2	0,44	4	0,88	1	0,22
Kemudahan Pengawasan	0,175	2	0,35	3	0,525	4	0,7	1	0,175
Kemudahan Evaluasi	0,130	2	0,26	3	0,39	4	0,52	1	0,13
Jumlah Skor dengan Bobot		2,305		2,695		2,83		2,17	
Urutan Prioritas		3		2		1		4	

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2020

Dari tabel 9, diketahui bahwa prioritas kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka di Indonesia secara berurutan adalah mempersiapkan sumber daya manusia, mempersiapkan sarana dan prasarana, mengurus perizinan, dan imunisasi vaksin COVID-19. Pada empat paragraf berikutnya, akan dijelaskan setiap kegiatan persiapan. Berdasarkan prioritas, mempersiapkan sumber daya manusia adalah kegiatan pertama yang harus dilakukan. Hal tersebut didasari oleh perolehan jumlah skor dengan nilai bobot yang didapat, yakni 2,83 dari skala 4. Berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya, mempersiapkan sumber daya manusia mendapatkan nilai maksimal pada aspek mudahnya biaya, kemudahan implementasi, kemudahan pengawasan, dan kemudahan implementasi. Mempersiapkan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang biayanya paling murah. Alasannya, terdapat metode yang dapat menurunkan biaya dalam persiapan sumber daya manusia. Metode yang dapat digunakan adalah penerbitan surat anjuran bagi para pelaku utama dan pendukung proses pembelajaran atau dapat dilakukan dengan melaksanakan seminar secara daring bertemakan persiapan pelaksanaan proses pembelajaran tatap muka bagi para pelaku utama atau pendukung pendidikan di Indonesia dari lembaga atau pihak terkait sebagai penyelenggara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan ini memiliki implementasi, pengawasan, dan evaluasinya paling mudah. Alasannya, implementasi, pengawasan, serta evaluasinya dapat dilakukan oleh dua lembaga saja. Kedua lembaga tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Di sisi lain, mempersiapkan sumber daya manusia merupakan kegiatan persiapan dengan skor

parameter urgensi paling rendah. Alasannya, mempersiapkan sumber daya manusia dapat dilakukan kapan saja dan bukan suatu kegiatan yang mendesak apabila dibandingkan dengan kegiatan persiapan lainnya.

Selanjutnya, mempersiapkan sarana dan prasarana adalah kegiatan kedua yang harus dilakukan. Hal tersebut didasari oleh perolehan jumlah skor dengan nilai bobot yang didapat, yakni 2,695 dari skala 4. Berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya, mempersiapkan sarana dan prasarana mendapatkan skor 3 pada urgensi penerapan, kemudahan pengawasan, dan kemudahan evaluasi. Mempersiapkan sarana dan prasarana mendapatkan skor 2 pada parameter murah nya biaya implementasi dan kemudahan implementasi. Mempersiapkan sarana dan prasarana mendapatkan skor 3 pada parameter urgensi penerapan karena dalam proses pengajuan perizinan, terdapat daftar periksa yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Pada parameter murah nya biaya implementasi, mempersiapkan sarana dan prasarana mendapatkan skor 2 karena biaya yang dibutuhkan dalam membangun sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran secara tatap muka tidaklah murah. Selanjutnya, untuk parameter kemudahan implementasi mempersiapkan sarana dan prasarana mendapatkan skor 2. Alasannya, membangun sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan tidak mudah. Hal tersebut didasari oleh biaya dan bahan baku yang dianggarkan untuk setiap satuan pendidikan bisa saja memiliki nilai yang berbeda. Untuk kemudahan pengawasan dan kemudahan evaluasi, mempersiapkan sarana dan prasarana mendapatkan skor 3. Hal tersebut didasari oleh standar sarana dan prasarana pemenuhan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 di Indonesia. Standar protokol kesehatan tersebut sudah diterapkan di beberapa instansi pemerintah daerah, salah satunya di kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Malang. Di kantor tersebut, telah dipasang wastafel, *hand sanitizer*, bilik SiCo (Sikat COVID-19), *thermal gun* (alat tembak untuk mengukur suhu tubuh), perubahan ruang tunggu di ruang terbuka, serta penyemprotan disinfektan dua kali sehari (Rohman & Larasati, 2020).

Kemudian, prioritas ketiga dalam persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka adalah mengurus perizinan. Dari proses analisis hierarki yang telah dilakukan, mengurus perizinan mendapatkan skor 2,305 dari skala 4. Berdasarkan parameter yang telah ditentukan, mengurus perizinan mendapatkan skor 3 pada murah nya biaya implementasi dan kemudahan implementasi. Sedangkan untuk parameter urgensi penerapan, kemudahan pengawasan, dan kemudahan evaluasi mendapatkan skor 2. Kegiatan mengurus perizinan mendapatkan skor 3 pada parameter murah nya biaya implementasi. Alasannya, pengurusan perizinan pembelajaran tatap muka telah memiliki dasar hukum yakni surat keputusan bersama 4 menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Sehingga, tata

cara komunikasi dan aturan pengeluaran anggaran untuk setiap lembaga sudah diatur dalam surat keputusan tersebut. Pada parameter urgensi penerapan, pengurusan perizinan mendapatkan skor 2. Alasannya, satuan pendidikan yang ingin mengurus perizinan untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka harus lebih dulu memenuhi syarat dan daftar periksa sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk menunjang pelaksanaan proses pembelajaran secara tatap muka. Sehingga, skor urgensi penerapan pembangunan sarana dan prasarana lebih tinggi daripada skor pengurusan perizinan. Pengurusan perizinan mendapatkan skor 3 pada parameter kemudahan implementasi. Alasannya, proses pengurusan perizinan telah memiliki dasar hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh satuan tugas pengawasan COVID-19 bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada parameter kemudahan pengawasan dan kemudahan implementasi, pengurusan perizinan mendapatkan skor 2. Alasannya, setiap proses perizinan di Indonesia membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ditambah, proses perizinan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Indonesia pada masa pandemi melibatkan banyak pihak. Sehingga, proses birokrasi yang dilalui dapat menghambat proses pengurusan perizinan. Berdasarkan hal tersebut, proses pengurusan perizinan sangat sulit untuk diawasi dan dievaluasi. Kegiatan persiapan dengan skor prioritas paling kecil adalah imunisasi vaksin COVID-19. Sebelum menganalisis hasil pengurutan prioritas lebih lanjut, alangkah baiknya untuk membahas vaksin terlebih dahulu. Vaksin merupakan mikroorganisme penyebab penyakit yang telah dilemahkan. Proses injeksi vaksin ke dalam tubuh manusia atau hewan disebut vaksinasi. Mikroorganisme yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia atau hewan tersebut tidak menyebabkan penyakit, melainkan membentuk zat-zat antibodi terhadap agen penyakit tersebut (Saputro, Santosa, & Kurtini, 2014). Saat ini, beberapa perusahaan kesehatan internasional telah memulai proses produksi vaksin COVID-19.

Tabel 10. Informasi terkait Perkembangan Proses Produksi Vaksin COVID-19

Perusahaan	Tahap	Jenis Vaksin
BioNTech Inc. dan Pfizer Inc. (Amerika Serikat)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Praklinis • Uji Klinis (April 2020) 	Vaksin mRNA
LineaRx, dan Takis Biotech (Roma, Italy)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Praklinis • Uji Klinis (April 2020) 	Vaksin DNA
Inovio Inc (Amerika Serikat)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Praklinis 	Vaksin DNA
Johnson & Johnson (Amerika Serikat)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Praklinis • Uji Klinis (September 2020) 	Vaksin Sub-unit Vaksin Vektor Hidup
Moderna Inc (Amerika Serikat)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Klinis Fase 1 (15 Maret 2020) • Uji Klinis Fase 2 	Vaksin mRNA
Novavax (Swedia)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Praklinis • Uji Klinis (Juni 2020) 	Vaksin Sub-unit
CanSino Biologic (Tiongkok)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Klinis Fase 1 	Vaksin mRNA

Sumber: Armanto Makmun dan Siti Fadhilah Hazhiyah, Tahun 2020

Dari tabel 10, dapat diketahui informasi mengenai proses produksi vaksin COVID-19 di berbagai negara. Informasi yang tersedia adalah perusahaan produsen beserta negara asal, tahap produksi vaksin, dan jenis vaksin. Berdasarkan data perkembangan tersebut, vaksin COVID-19 sepertinya baru akan dapat disebarkan kepada masyarakat Indonesia pada bulan Januari 2021. Selanjutnya, jumlah individu yang perlu divaksinasi adalah sebanyak 42,145% penduduk Indonesia dengan cakupan daerah yang masyarakatnya divaksinasi adalah sebesar 75% hingga 86% (Fajar, 2020). Pada paragraf berikutnya, akan dijelaskan hasil analisis prioritas pelaksanaan imunisasi vaksin COVID-19 sebagai persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Indonesia.

Pada parameter murahnya biaya implementasi, imunisasi vaksin COVID-19 mendapatkan skor 1. Hal tersebut didasari oleh biaya yang dibutuhkan dalam proses riset dan proses produksi vaksin COVID-19. Pada parameter urgensi penerapan, imunisasi vaksin COVID-19 mendapatkan skor 4. Alasannya, vaksinasi dapat menciptakan *herd immunity* (kekebalan kelompok) meskipun secara tidak langsung. Proses terjadinya kekebalan kelompok masyarakat dengan vaksinasi dimulai dengan masyarakat yang telah divaksinasi, dibebaskan untuk berkegiatan di lingkungan umum. Dengan adanya individu yang telah kebal melalui vaksinasi, kelompok masyarakat yang rentan terhadap COVID-19 dapat terlindungi oleh individu yang telah divaksinasi dari infeksi virus COVID-19. Dengan proses tersebut, angka infeksi virus dapat terus menurun hingga tidak terdapat lagi kasus positif COVID-19 (Hardy, 2020). Selanjutnya, kegiatan imunisasi vaksin COVID-19 mendapatkan skor 1 pada kemudahan implementasi, kemudahan pengawasan, dan kemudahan evaluasi. Alasannya, imunisasi berskala besar untuk kelompok usia produktif belum pernah dilakukan di Indonesia. Maka, perlu dilakukan persiapan dan perencanaan tersendiri untuk melakukan imunisasi vaksin COVID-19. Begitu pula halnya dengan proses pengawasan dan evaluasi imunisasi vaksin COVID-19. Karena belum pernah dilakukan di Indonesia, dibutuhkan persiapan dan perencanaan dalam pelaksanaan imunisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah kesimpulan yang peneliti dapatkan.

1. Secara umum, kondisi pendidikan di Indonesia masih rendah secara kualitas, namun sudah cukup baik dari sisi kualitas. Aspek pendidikan yang berkembang positif di Indonesia adalah jumlah institusi pendidikan dasar dan menengah, jumlah peserta pendidikan dasar dan menengah, persentase partisipasi pendidikan dasar dan menengah, persentase buta huruf, dan jumlah mahasiswa. Sedangkan aspek pendidikan di Indonesia yang masih kurang adalah kualitas sekolah di Indonesia, kompetensi guru, aspek dan mutu pendidikan secara umum, mutu pendidikan tinggi, literasi sains, serta hasil pemetaan PISA.

2. Pemenuhan standar pendidikan nasional, sebuah dasar penilaian kualitas pendidikan, di Indonesia telah mencapai angka yang cukup tinggi pada tahun 2012. Hal tersebut ditandai dengan nilai rata-rata pencapaian standar pendidikan nasional sebesar 85,97% pada tingkat SMP.
3. Dalam praktik proses pembelajaran di Indonesia, materi yang disampaikan merupakan aspek yang paling berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Selanjutnya, proses pembelajaran merupakan standar yang paling berpengaruh kedua terhadap kompetensi lulusan setelah standar penilaian.
4. Aspek utama dalam proses pembelajaran di Indonesia adalah peserta didik, tenaga pengajar, interaksi, sumber belajar, dan lingkungan belajar.
5. Pemerintah melalui 4 kementerian berencana untuk melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka di masa pandemi yang akan dimulai pada Januari 2021. Terdapat 3 urgensi utama pelaksanaan pembelajaran tatap muka, yakni ancaman putus sekolah, tumbuh kembang terkendala, dan tekanan psikososial.
6. Pelaksanaan proses pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan pada Januari 2021 dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Satuan pendidikan yang akan melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka harus mengurus perizinan terlebih dahulu. Perizinan yang harus diurus adalah dari Pemda dan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.
7. Dalam proses persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, terdapat 4 kegiatan yang harus dipersiapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah mengurus perizinan, mempersiapkan sarana dan prasarana, mempersiapkan sarana dan prasarana, serta imunisasi vaksin COVID-19. Penelitian ini telah menentukan prioritas pelaksanaan persiapan yang harus dilakukan berdasarkan 5 parameter. Parameter tersebut adalah murahnya biaya implementasi, urgensi penerapan, kemudahan implementasi, kemudahan pengawasan dan kemudahan evaluasi. Berdasarkan lima parameter tersebut, pelaksanaan persiapan pembelajaran tatap muka sesuai prioritas adalah mempersiapkan sumber daya manusia, mempersiapkan sarana dan prasarana, mengurus perizinan, dan terakhir imunisasi vaksin COVID-19.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai persiapan pembelajaran tatap muka di Indonesia, terdapat beberapa saran yang direkomendasikan. Saran yang direkomendasikan dikelompokkan berdasarkan pelaku (pemerintah dan masyarakat) dan waktu (jangka pendek dan jangka panjang):

1. Dalam jangka pendek, pemerintah diharapkan untuk mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran tatap muka secara matang. Persiapan yang dilakukan menurut prioritas yang telah diteliti adalah menyiapkan sumber daya

- manusia, menyiapkan sarana dan prasarana, mengurus perizinan, dan imunisasi vaksin COVID-19 secara berurutan.
2. Dalam jangka panjang, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, pemerintah sebisa mungkin mempertahankan perkembangan positif kondisi pendidikan secara kuantitatif di Indonesia serta meningkatkan angka pemenuhan standar pendidikan nasional pada berbagai tingkat pendidikan.
 3. Dalam jangka pendek, masyarakat diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selain itu, masyarakat disarankan agar tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang terjadi.
 4. Dalam jangka panjang, masyarakat diharapkan untuk tetap menjaga kesehatan serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan pada masa setelah pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M. (2020). Estimasi Angka Reproduksi Novel Coronavirus (COVID-19) Kasus Indonesia. 1-9. Dikutip pada November 29, 2020, dari https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Fajar5/publication/340248900_ESTIMATION_OF_COVID-19_REPRODUCTIVE_NUMBER_CASE_OF_INDONESIA_Estimasi_Angka_Reproduksi_Novel_Coronavirus_COVID-19_Kasus_Indonesia/links/5e7f114492851caef4a592f8/ESTIMATION-OF-COVID
- Fürnkranz, J., & Hüllermeier, E. (2010, September 3). Preference Learning and Ranking by Pairwise Comparison. *Preference Learning*, 65-82. doi:10.1007/978-3-642-14125-6_4
- Hardy, F. R. (2020, Mei). Herd Immunity Tantangan New Normal Era Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 55. Dikutip pada November 29, 2020, dari <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/70/55>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014, Desember 1). *Microsoft PowerPoint - Paparan Menteri - Kadisdik 141201 - Low v.0.3*. Dikutip pada November 24, 2020, dari <https://www.slideshare.net/tonnysabastian/paparan-menteri-kadisdik-141201-low-v0-42300800>
- Makmun, A., & Hazhiyah, S. F. (2020, Oktober). TINJAUAN TERKAIT PENGEMBANGAN VAKSIN COVID-19. *Molucca Medica*, 13(2), 52-59. doi:10.30598/molmed.2020.v13.i2.52
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2020, Maret 17). *Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah.pdf* - Google Drive. Dikutip pada November 24, 2020, dari *Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 (SE Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020)* - Kingramli.com: https://drive.google.com/file/d/1dVjhFWLrfY_GBIW8xPeEBrlJCmiSGpCw/view
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, Maret 9). *SE Kemdikbud Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona di*

- Kemendikbud.pdf* - Google Drive. Dikutip pada November 24, 2020, dari Surat Edaran Mendikbud Nomor 2 Tahun 2020 | GTKDIKMENDIKSUS | 2020: https://drive.google.com/file/d/1DcuNggz4REcY_xGkLscfQEFF6KZsgTgL/view
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, Maret 9). *SE Kemdikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona pada satuan pendidikan.pdf* - Google Drive. Dikutip pada November 24, 2020, dari Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 | GTKDIKMENDIKSUS | 2020: <https://drive.google.com/file/d/15jxZumrgZy4eriSdx1SVAh2ZkKbCs3Ju/view>
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020, Agustus 7). *SALINAN_REVISI-SKB-4-MENTERI-PTM-AGUSTUS-2020.pdf*. Dikutip pada dari bersama hadapi korona – KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN: https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/08/SALINAN_REVISI-SKB-4-MENTERI-PTM-AGUSTUS-2020.pdf
- Nulhaqim, S. A., Heryadi, R. D., Pancasilawan, R., & Fedryansyah, M. (2016). Peranan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Menghadapi ASEAN Community 2015. *SHARE: Social Work Journal*, 154-272. doi:10.24198/share.v6i2.13209
- Ookla. (2020, Oktober). *Speedtest Global Index – Monthly comparisons of internet speeds dari around the world*. Dikutip pada November 23, 2020, dari Speedtest oleh Ookla - Uji Kecepatan Broadband Global: <https://www.speedtest.net/global-index#fixed>
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*. Dikutip pada November 24, 2020, dari JDIH | Home: https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/UU_20_2003.pdf
- Presiden Republik Indonesia. (2005). *RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH*. Dikutip pada November 24, 2020, dari JDIH | Home: https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/Pepres_19_2005.pdf
- Putria, H., Maula, L. H., & Uswatun, D. A. (2020). Analisis Proses Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi COVID-19 pada Guru Sekolah Dasar. *JURNAL BASICEDU*, 4(4), 861-872. doi:10.31004/basicedu.v4i4.460
- Raharjo, S. B. (2012). EVALUASI TREND KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 511-532. doi:10.21831/pep.v1i2.1129
- Rohman, A., & Larasati, D. C. (2020). STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI ERA TRANSISI NEW NORMAL. *Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 151-163. doi:10.33366/rfr.v10i2.1952
- Saputro, B., Santosa, P. E., & Kurtini, T. (2014). PENGARUH CARA PEMBERIAN VAKSIN ND LIVE PADA BROILER TERHADAP TITER ANTIBODI, JUMLAH SEL DARAH MERAH DAN SEL DARAH PUTIH. *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu*, 2(3), 43-48. doi:10.23960/jipt.v2i3.p%25p
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020, November 20). *FINAL Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020_2021_20201120.pdf*. Dikutip pada November 25, 2020, dari Pedoman Pembelajaran Pada Semester Genap TA 2020/2021 - Protokol | Satgas Penanganan COVID-19: https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/2020/November/FINAL_Pedoman%20Pembelajaran%20pada%20Semester%20Genap%20TA%202020_2021_20201120.pdf

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020, November 22). *Peta Sebaran | Satgas Penanganan COVID-19*. Dikutip pada November 23, 2020, dari <https://covid19.go.id:https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Vidal, L.-A., Marle, F., & Bocquet, J.-C. (2011, Agustus). Measuring project complexity using the Analytic Hierarchy Process. *International Journal of Project Management*, 29(6), 718-727. doi:10.1016/j.ijproman.2010.07.005